

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Klasifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, dan akibatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Nurhaeni, 2020). Menurut Kementrian Sosial RI dalam tercatat sebanyak 26 jenis yang masuk ke dalam kategori PMKS (Badan Pusat Statistik, 2019):

a. Anak balita terlantar

Anak berusia tahun ke bawah yang tidak mendapatkan perhatian, pengasuhan, atau perlindungan dari orang tua dan/atau keluarganya yang tidak mampu, sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dan anak dimanfaatkan untuk tujuan tertentu..

b. Anak terlantar

Anak berusia antara 6 dan 18 tahun (usia 18) termasuk mereka yang dilecehkan dan ditinggalkan oleh keluarga, orang tua atau anak -anak mereka, kehilangan hak asuh terhadap orang tua mereka

c. Anak yang berhadapan langsung dengan hukum

Anak yang berusia 12 tahun (12 tahun) tetapi yang belum mencapai usia 18 (18 tahun) termasuk anak -anak yang dituntut, ditahan atau dihukum karena seorang anak yang mungkin menjadi korban tindakan kriminal atau anak yang melihat atau mendengar kejahatan.

d. Anak jalanan

Anak yang mencari nafkah di jalan atau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjalani aktivitas sehari-hari di jalanan.

e. Anak kedisabilitas

Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan memiliki gangguan fisik atau mental yang menghambat kemampuannya dalam menjalankan fungsi fisik, psikologis, maupun sosial secara optimal.

f. Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

- Anak yang menghadapi ancaman baik secara fisik maupun nonfisik akibat tindakan kekerasan, perlakuan salah, atau perlakuan yang tidak layak di dalam keluarga maupun lingkungan sosial terdekatnya.
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Anak yang berusia 0 hingga 18 tahun yang berada dalam kondisi darurat, menjadi korban perdagangan manusia atau penculikan, mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis, menjadi korban eksploitasi, berasal dari kelompok minoritas, terisolasi, atau komunitas adat terpencil, serta anak yang terdampak penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), maupun yang terinfeksi HIV/AIDS.
- h. Lanjut usia terlantar
- Seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik, mental, maupun sosialnya secara mandiri.
- i. Penyandang disabilitas
- Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental
- j. Tuna susila
- Seseorang yang secara berulang dan bergantian melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan tujuan memperoleh imbalan berupa uang, barang, atau layanan.
- k. Gelandangan
- Individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi yang tidak sejalan dengan norma kehidupan layak menurut masyarakat setempat, tidak memiliki pekerjaan tetap maupun tempat tinggal permanen, serta berpindah-pindah di ruang publik.
- l. Pengemis
- Orang yang memperoleh penghasilan dengan cara mengemis di tempat umum, menggunakan berbagai cara untuk menarik simpati dan belas kasihan dari orang lain.
- m. Pemulung
- Orang yang bekerja dengan cara mencari dan mengumpulkan barang-barang bekas untuk didaur ulang.
- n. Kelompok minoritas

Individu atau atau kelompok yang tidak termasuk dalam kelompok dominan, dengan ciri khas seperti bangsa, suku, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, seperti waria, gay, dan lesbian..

o. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)

Seseorang telah menyelesaikan atau dalam waktu 3 bulan akan mengakhiri masa hukuman atau pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan, namun mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan masyarakat, sehingga menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal.

p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Seseorang yang telah terinfeksi HIV dan memerlukan layanan sosial, perawatan medis, dukungan, serta pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang terbaik.

q. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Seseorang yang menggunakan NAPZA tanpa sengaja, akibat dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengonsumsinya.

r. Korban *trafficking*

Seseorang yang mengalami penderitaan dalam aspek psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan manusia. (UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

s. Korban tindak kekerasan

Individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami tindak kekerasan, baik akibat penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, maupun bentuk kekerasan lainnya, atau orang yang berada dalam situasi berbahaya yang mengganggu fungsi sosialnya..

t. Pekerja migran bemasalah sosial (PMBS)

Pekerja migran baik yang bergerak secara internal maupun lintas negara, yang menghadapi masalah sosial seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), atau kesulitan dalam beradaptasi dengan tempat kerja baru atau negara tempat mereka bekerja, sehingga mengganggu fungsi sosial mereka.

u. Korban bencana alam

Orang atau kelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam, yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

v. Korban bencana sosial

Orang atau kelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dipicu oleh tindakan manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau komunitas, serta teror..

w. Perempuan rawan sosial ekonomi

wanita dewasa berusia 18 hingga 59 tahun yang belum menikah atau janda, dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari

x. Fakir miskin

Kepala keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, atau yang meskipun memiliki penghasilan, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang layak untuk kehidupan manusiawi

y. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan baik

z. Komunitas terpencil

Kelompok orang masyarakat yang hidup dalam komunitas kecil, lokal, dan terpencil, yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan mereka, serta terisolasi secara sosial dan budaya, tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan untuk menghadapi perubahan lingkungan secara keseluruhan.

2.1.2. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan yang mengalami kerawanan sosial ekonomi termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan seharusnya menjadi salah satu fokus utama program pemerintah. Menurut Dinas Sosial, perempuan rawan sosial ekonomi adalah wanita yang belum menikah atau janda yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Pendidikan et al., 2022). Adapun kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan berumur antara 18 hingga 59 tahun;
- b. Seorang istri yang secara tanpa kejelasan ditinggalkan oleh suami;
- c. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga; dan
- d. Perempuan dengan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan sering kali mengalami kemiskinan karena rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan, layanan sosial, serta

sumber daya produksi. Selain itu, perempuan cenderung memiliki jaringan kekerabatan yang kurang mendukung. Fenomena ini, di mana perempuan, khususnya yang menjadi kepala rumah tangga, lebih sering mengalami kemiskinan, sering kali dikaitkan dengan pendapatan mereka yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki.. Kondisi ini dikenal sebagai feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*).

2.2 Tinjauan Umum *Women Empowerment* (Pemberdayaan Wanita)

2.2.1. Definisi Pemberdayaan Wanita

Women Empowerment atau pemberdayaan wanita adalah proses wanita memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan penting dalam yang memengaruhi kehidupan diri mereka sendiri ataupun komunitas mereka. Proses pemberdayaan memerlukan kemampuan alternatif dikarenakan perempuan dan laki-laki memiliki daya kemampuan memilih secara berbeda. Dalam hal ini, kemampuan alternatif merujuk kepada kemampuan memilih menggunakan aspek kekuasaan di mana wanita tidak memiliki daya di awal kemudian memiliki daya untuk melakukan banyak pilihan dalam hidup mereka. Wanita membangun proses pemberdayaan berdasarkan pandangan subjektif mereka, yang kemudian menghasilkan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. (Sleman, 2019).

Menurut Sardenberg (2016) dalam (Arroyo & Camacho, 2024) pendekatan pemberdayaan wanita terbagi menjadi dua jenis yaitu liberal dan kebebasan. Pendekatan liberal mengonseptualisasikan pemberdayaan sebagai sebuah alat untuk mengembangkan diri dan berfokus pada ciri-ciri tertentu untuk memperoleh manfaat yang lebih baik seperti halnya gaji atau pekerjaan di kemudian hari. Sedangkan pendekatan kedua, yaitu kebebasan lebih mengarah kepada hubungan kekuasaan menjadi suatu aspek sentral, sehingga seorang wanita yang telah diberdayakan akan menentukan Nasib dan memperoleh otonominya sendiri yang menjadi penting dalam memperjuangkan melawan sistem sosial-ekonomi.

Dalam perspektif ini, pemberdayaan harus dipahami bukan sebagai sifat individu, tetapi sebagai kondisi lingkungan di mana perilaku individu difasilitasi melalui tindakan individu lain (atau kelompok individu) yang, terbenam dalam domain budaya tertentu, dapat memperluas fungsi kontrol rangsangan dan mentransfernya kepada individu pertama.

2.2.2. Target Pemberdayaan Wanita

Dalam proses pemberdayaan perempuan ada beberapa aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi Perempuan di berbagai bidang. Dalam mencapai target tersebut tentunya ada berbagai program kerja yang dilaksanakan di dalamnya.

a. Kegiatan Program Kerja UN *Women*

Program yang terdapat pada UN Women telah dilaksanakan di setiap negara anggota dan menghasilkan kerangka kerja daerah. Program UN Women kini dijalankan melalui undang-undang, kebijakan, tindakan, layanan, serta implementasi, dan juga melalui kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, dunia akademik, dan sektor swasta. (UN Women.”What We Do”). UN *Women* berfokus pada program-program berikut:

1) Kepemimpinan dan Partisipasi Politik

UN Women berkolaborasi dengan negara dari bagian PBB lainnya dan penduduk setempat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dalam pemilihan, termasuk kemampuan untuk memilih dalam pemilihan dan kemampuan untuk memilih tanpa kekerasan dalam pemilihan.

2) Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Perempuan

Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan menjadi kunci keberhasilan negara. Pendanaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan jalan cepat mencapai kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3) Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

UN Women juga melakukan kampanye untuk mengubah norma dan perilaku laki-laki serta memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak para wanita. UN Women bekerja sama dengan pemerintahan dalam merencanakan gerakan nasional, khususnya untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan pada perempuan, serta mengukuhkan hubungan kerja sama antar berbagai pihak yang diperlukan untuk melakukan aksi yang berkelanjutan..

4) Menjaga Perdamaian dan Keamanan

Demi menggapai dan memaksimalkan semua tujuan usaha perdamaian dan memastikan bahwa perempuan dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang melanggar HAM, UN Women telah mencapai perubahan transformatif dengan bekerja di bidang-bidang berikut:

- a) Mediasi dalam melakukan penanganan konflik (Mediation and conflict prevention)
- b) Menciptakan perdamaian dan perawatan (Peacebuilding and recovery)
- c) Perdamaian (Peacekeeping)
- d) Mengakhiri pembebasan hukum (Ending impunity)
- e) Melawan tindakan ekstrim (Countering violent extremism)
- f) Rencana aksi nasional(National Action Plans)
- g) Koordinasi dan pelaporan PBB (UN coordination and reporting)
- h) Keterlibatan dengan Dewan Keamanan (Engagement with the Security Council)
- i) Pendanaan Katalytic (Catalytic funding)

5) Aksi Kemanusiaan

UN Women berperan dalam penanganan dan mengatasi konflik melalui kegiatan preskriptif yang membantu Negara Anggota dan PBB dalam pengembangan dan penerapan kebijakan serta pemrograman di lapangan. Tugas UN Women dalam divisi ini terdapat tiga program dalam operasionalnya: upaya pencegahan, persiapan, dan tanggapan terhadap krisis

6) Keterlibatan Pemuda pada kesetaraan gender (Youth and gender equality)

UN Women membuat strategi multilateral yang tidak hanya dipergunakan untuk meninjau bentuk pembelaan dan keterlibatan tradisional, tetapi juga teknologi dalam pendekatannya untuk melibatkan pria dan wanita muda. Strategi UN Women mencakup peningkatan kemitraan dengan lembaga yang lebih lebar, keahlian, dan pengawasan serta penilaian aktif. Strategi Kesetaraan Gender dan anak muda UN Women diperluas dengan kajian mendalam dan serentetan konsultasi yang menyertakan berbagai pihak-pihak yang terlibat sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk wakil dari sektor publik dan swasta serta masyarakat lokal.

7) Perencanaan Nasional dan Pemerintahan

8) Pembangunan Berkelanjutan

b. GOW Semarang

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) adalah wadah organisasi perempuan yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan peningkatan ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan. GOW Kota Semarang didirikan pada 17 Oktober 1961 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan tersebut.

Ruang lingkup Program Umum GOW Kota Semarang disusun berdasarkan pembagian tugas yang terbagi dalam beberapa bidang, yang masing-masing memiliki sub-bidang, yaitu (Titissari, 2016):

- 1) Bidang Organisasi
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Ekonomi
- 4) Bidang Kesejahteraan
- 5) Bidang Lingkungan Budaya

c. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menangani permasalahan Wanita Rawan Sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kewajiban pemerintah dalam menangani masalah sosial.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, PSKW melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, yaitu:

- 1) ATM (*Achievement Motivation Training*)
- 2) Praktik Belajar Kerja (PBK)
- 3) Sertifikasi Keterampilan
- 4) Bimbingan Lanjut dan Temu Alumni
- 5) Pertemuan Pra Pemulangan Klien

2.2.3. Tujuan Pemberdayaan Wanita

Dalam pemberdayaan terhadap perempuan, bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). UN Women menyampaikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk menciptakan sasaran gender yang setara dan pemberdayaan kepada seluruh perempuan di dunia. Keseluruhan ini berisi sembilan tujuan yakni (UN Women.”What We Do”):

- a. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana pun mereka berada.
- b. Menghilangkan semua jenis kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan, baik yang terjadi di khalayak umum atau swasta, yang di dalamnya termasuk perdagangan manusia, ataupun bentuk eksploitasi lainnya
- c. Menghapuskan semua tindakan yang dapat menyebabkan kerugian, seperti pernikahan dini dan pernikahan yang dipaksakan.
- d. Mengakui dan mengakui kontribusi pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dengan menyediakan layanan publik, infrastruktur, perlindungan sosial, serta mempromosikan pembagian tugas yang adil antara rumah tangga dan keluarga di tingkat nasional. Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat kehidupan politik, ekonomi, dan publik.
- e. Melakukan reformasi untuk menjamin kesetaraan hak perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, termasuk kepemilikan tanah, properti lainnya, layanan keuangan, hak waris, serta pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
- f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi bantu, terutama teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam menentukan nasib mereka sendiri.
- g. Memperkuat kebijakan serta undang-undang yang dapat diberlakukan untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan di semua tingkat

Tujuan pada proses pembinaan dan pemberdayaan menjadi penting berkaitan dengan sifatnya yaitu *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Sehingga dalam hal tersebut World Bank memberikan beberapa syarat yang perlu dipersiapkan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan tersebut, diantaranya:

- a. Perbaikan finansial, dapat berupa perencanaan ekonomi makro dan pengelolaan anggaran,
- b. Peningkatan modal fisik seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung,
- c. Peningkatan modal sumber daya manusia, misalnya melalui perbaikan di bidang pendidikan,
- d. Pengembangan sumber daya sosial, termasuk peningkatan kerajinan keterampilan masyarakat, bentuk kerjasama, penguatan kelembagaan,
- e. Pengaturan dan pemeliharaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan air, penanganan limbah industri, serta berbagai aspek lainnya.

Beberapa poin yang sudah disebutkan di atas menunjukkan pemberdayaan memiliki tujuan yang meliputi beberapa usaha untuk evaluasi, diantaranya:

- a. Peningkatan pendidikan bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih maju. Hal ini tidak hanya mencakup perbaikan fasilitas, materi ajar, dan hubungan antara pengajar serta peserta didik, tetapi yang lebih penting adalah upaya untuk menumbuhkan semangat belajar
- b. Peningkatan tindakan menyatakan bahwa dengan evaluasi dalam pendidikan dan akses, tindakan yang diambil oleh masyarakat juga akan lebih efektif dan baik
- c. Peningkatan aksesibilitas (*better accessibility*) dalam konsep pemberdayaan yang berkelanjutan, perbaikan aksesibilitas yang dimaksud adalah berfokus pada perbaikan akses terhadap informasi, komunikasi, sumber pembiayaan, pengadaan peralatan, produk, dan lembaga pemasaran, yang pada gilirannya diharapkan memperbaiki kualitas pendidikan.
- d. Peningkatan lingkungan (*better environment*) diharapkan apabila usaha masyarakat semakin berkembang dan pendapatan meningkat, hal ini dapat mengurangi kerusakan lingkungan, yang sering kali disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang rendah
- e. Peningkatan usaha (*better business*) diharapkan agar perbaikan-perbaikan yang telah disebutkan sebelumnya dapat mendorong kemajuan usaha atau bisnis yang tengah dijalankan oleh masyarakat
- f. Peningkatan kelembagaan (*institution*) bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan kemitraan dan kerjasama antar lembaga, yang akan memperkuat berbagai aspek dalam pemberdayaan.

- g. Peningkatan kualitas hidup (*better living*) menyatakan bahwa jika semua perbaikan tersebut berjalan dengan baik, maka peningkatan pendapatan dan kualitas lingkungan akan berdampak positif pada kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- h. Peningkatan kualitas masyarakat (*better community*) diharapkan agar dengan meningkatnya kualitas hidup, interaksi antar masyarakat pun akan menjadi lebih baik.

2.2.4. Tahap Pemberdayaan Wanita

Beberapa proses diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hak, posisi, dan peran wanita dalam masyarakat.



Gambar 2.1 Pemberdayaan Perempuan
Sumber: <https://www.dreamstime.com/>

Dalam proses pemberdayaan memiliki tahapan dalam prosesnya yang menurut Ambar T. Sulistyani (2004) terdapat beberapa tahapan yaitu:

1) Tahap Penyadaran

Proses pertama dalam pemberdayaan masyarakat adalah tahap penyadaran, di mana individu mulai menyadari pentingnya perubahan dan merasa terdorong untuk meningkatkan diri. Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan pemberdayaan dapat berlangsung dengan sukses. Melalui penyadaran ini, masyarakat menjadi lebih peka terhadap situasi yang

mereka hadapi, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk berusaha memperbaiki keadaan demi masa depan yang lebih baik..

2) Tahap Transformasi Kemampuan

Pada tahap ini, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan untuk mempersiapkan mereka berperan aktif dalam pembangunan. Tahap kedua ini akan efektif hanya jika tahap pertama, yaitu penyadaran, telah tercapai dengan baik. Di sini, masyarakat mulai belajar hal-hal yang relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tingkat rendah, di mana mereka hanya berperan sebagai pengikut atau objek dalam proses pembangunan..

3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Pada tahap ketiga ini, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mencapai kemandirian. Ini adalah tahap penguatan kapasitas intelektual dan keterampilan yang penting agar masyarakat dapat berdiri sendiri. Kemandirian ini akan tercermin dari kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah proaktif, menciptakan ide-ide baru, dan berinovasi dalam komunitas mereka. Apabila masyarakat berhasil melewati tahap ini, mereka akan mampu menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pihak luar.

2.2.5. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan memiliki kecenderungan dua kecenderungan yang telah dijelaskan dalam buku Rajuminropa yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer berfokus pada memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu serta masyarakat agar dapat berupaya membangun aset material untuk mencapai kemandirian melalui komunitas. Berbeda halnya dengan kecenderungan sekunder yang lebih menekankan pentingnya memberikan dorongan atau motivasi kepada individu agar mereka memiliki daya untuk menentukan arah kehidupannya.

Tahapan-tahapan menurut Isbandi Ruminto Adi (2001) dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan atau *engagement*, pada tahap ini menekankan pada dua aspek penting yaitu persiapan lapangan dan juga persiapan petugas.

- b. Tahap Pengkajian atau *assessment*, di mana masyarakat sudah berperan aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan, dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi dan masalah yang ada di lingkungan mereka.
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, melibatkan pembahasan perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh, dengan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi.
- d. Tahap Formulasi Rencana Aksi, Masyarakat dan fasilitator memainkan peran penting dalam menjalin kerjasama yang efektif dan optimal
- e. Tahap Pelaksanaan, tahap ini adalah pelaksanaan langsung dari program yang telah direncanakan bersama masyarakat sebelumnya. Pada tahap ini, tindakan konkret dilaksanakan melalui kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan petugas pemberdayaan.
- f. Tahap Evaluasi, tahap ini fokus utama adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bersama petugas untuk memastikan jalannya program pemberdayaan. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk menetapkan indikator-indikator kesuksesan dari program yang sudah diterapkan dan menjaga agar perubahan atau kebiasaan baru yang diinginkan dapat terus berlangsung dengan stabil.

2.2.6. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pedoman atau hal dasar yang semestinya dilaksanakan dalam proses pemberdayaan sebagai upaya pemastian bahwa tujuan pemberdayaan tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama pemberdayaan menurut Zubaedi dibagi menjadi empat yaitu *pertama*, pengembangan masyarakat menentang suatu pandangan yang menganggap bahwa tidak ada posisi yang diambil dalam suatu kepentingan. *Kedua*, adalah untuk mengubah segala bentuk diskriminasi, pemaksaan, dan penindasan terhadap masyarakat. *Ketiga*, mengutamakan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka secara demokratis. Prinsip terakhir adalah memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program pelayanan yang tersedia bagi mereka.

Menurut Totok Mardikanto, secara garis besar dapat dilihat mengenai prinsip-prinsip pembinaan dan pemberdayaan yaitu:

- a. Mengajak masyarakat untuk melakukan pekerjaan ataupun menerapkan sesuatu,

- b. Pemberdayaan harus memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat yang diberdayakan maupun untuk seluruh masyarakat di sekitarnya,
- c. Setiap kegiatan dalam pemberdayaan memiliki kolaborasi ataupun berkaitan dengan kegiatan yang lain

2.3 Tinjauan Gender

2.3.1. Konsep Gender Secara Umum

Pengertian gender lebih menunjukkan peran, atribut sosial, dan identitas yang dibangun berkaitan dengan laki-laki, perempuan, maupun individu lainnya. Pemahaman mengenai gender tidak hanya sebatas perbedaan secara biologis dua gender yang ada yakni perempuan dan laki-laki, namun juga terkait dengan norma, harapan, juga peran yang diterima oleh masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana seharusnya individu tersebut berperilaku. Keterkaitan era tantara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan struktur keadilan masyarakat (Fakih, 2008) menjadi hal yang cukup penting untuk dianalisis karena munculnya beberapa persoalan ketidakadilan yang terjadi pada beberapa kaum perempuan.

Pada dasarnya konsep gender berbeda dengan seks (jenis kelamin). Seks mengacu pada pembagian individu berdasarkan ciri-ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan bentuk tubuh antara keduanya. Sebaliknya, gender berkaitan dengan peran dan identitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kedua jenis kelamin yang telah dijelaskan. Hal ini dapat dilihat secara sosial maupun kulturalnya. Misalnya, seorang laki-laki biasanya dianggap memiliki sifat yang kuat, perkasa, dan rasional sedangkan seorang perempuan cenderung dianggap memiliki sifat yang lemah lembut, manja, perasa atau emosional. Namun kedua hal tersebut masih bisa dipertukarkan, artinya tidak semua individu yang berjenis laki-laki memiliki sifat kuat, tangguh, dan perkasa, begitupun sebaliknya dengan individu berjenis kelamin perempuan.

Umumnya gender lebih ditentukan oleh norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. Misalnya bagaimana cara berpakaian, berperilaku, dan melakukan pekerjaan yang dianggap “sesuai” dengan keadaan sosial dan kultural di dalam masyarakat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender muncul akibat berbagai faktor, seperti proses pembentukan, sosialisasi, penguatan, serta konstruksi sosial atau budaya, yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan peraturan negara. Seiring dengan berjalannya waktu, proses sosialisasi gender ini dianggap sebagai kehendak Tuhan, sehingga perbedaan tersebut dianggap sebagai

sifat biologis yang tak dapat diubah, dan dengan demikian, perbedaan gender dipandang sebagai kodrat alami laki-laki dan perempuan

2.3.2. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender

Kesetaraan gender adalah keadaan di mana individu tanpa memperhatikan jenis kelamin atau identitas gender, berhak untuk menerima perlakuan yang setara dan memiliki akses yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan, karier, politik, dan interaksi sosial. Prinsip ini menuntut bahwa setiap orang diberikan peluang yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat, terlepas dari perbedaan biologis atau sosial yang ada antara pria dan wanita. Ketika adanya perbedaan, maka akan terjadilah suatu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah keadaan di mana sistem maupun struktur baik kaum laki-laki ataupun perempuan dalam sistem tersebut. Menurut Fakih (2008), ketidakadilan ini dapat berupa proses pemiskinan ekonomi atau dapat disebut marginalisasi. Marginalisasi ini dapat terjadi melalui hal negative, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Beberapa ketidakadilan gender (Fakih, 2008) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gender dan Subordinasi

Asumsi bahwa perempuan cenderung melekat pada sifat emosional dan irasional sehingga perempuan seringkali dianggap tidak dapat memimpin. Hal tersebut dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi yang terjadi akibat perbedaan gender ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang bervariasi, tergantung pada konteks geografis dan waktu tertentu. Fenomena ini tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan tempat serta periode sejarah, mencerminkan bagaimana norma sosial, budaya, dan sistem kekuasaan memengaruhi posisi dan perlakuan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka

b. Gender dan Marginalisasi Wanita

Proses yang menyebabkan kemiskinan sering terjadi di masyarakat dan negara, mempengaruhi baik pria maupun wanita, dan dipicu oleh berbagai faktor seperti pengusuran, bencana alam, atau eksploitasi. Namun, pemiskinan yang dialami perempuan sering kali lebih disebabkan oleh ketidaksetaraan gender. Perbedaan dalam cara, waktu, dan tempat marginalisasi perempuan dapat sangat bervariasi, tergantung

pada faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, penafsiran agama, adat istiadat, atau bahkan asumsi yang ada dalam ilmu pengetahuan.

c. Gender dan Stereotipe

Stereotype dapat diartikan sebagai tanda atau pelabelan pada suatu kelompok tertentu. Namun, stereotipe ini ternyata dapat menimbulkan kerugian dan juga ketidakadilan. Gender merupakan salah satu sumber dari jenis stereotipe tersebut. Pada perempuan stereotipe ini sudah banyak terjadi. Sebagai contoh adalah, Ketika perempuan berdandan atau bersolek, maka Masyarakat mengasumsikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari para laki-laki. Bahkan Ketika terjadi kejahatan seksual pada perempuan, Masyarakat cenderung menyalahkan korban perempuan.

2.6 Tinjauan Umum *Women Empowerment Center* (Pusat Pemberdayaan Wanita)

2.4.1. Definisi *Women Empowerment Center*

Secara etimologi, *Women Empowerment Center* atau pusat pemberdayaan yaitu pusat, pemberdayaan, dan wanita itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pusat" mengacu pada hal utama atau titik fokus yang mengumpulkan berbagai hal atau kegiatan, yang menarik perhatian di sekitarnya. Pemberdayaan, yang berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan, merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan cara memberi dorongan, motivasi, serta menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Sedangkan wanita merujuk pada seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya. Wanita telah memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun. Dapat disimpulkan bahwa *Women Empowerment Center* adalah sebuah pusat atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk mawadahi para perempuan dalam upaya pengembangan potensi mereka dan mengatasi permasalahan atau tantangan kesejahteraan sosial dan ekonomi

Fokus utama dari Pusat Pemberdayaan Wanita adalah memberdayakan para perempuan yang pernah merasakan masalah sosial ekonomi supaya mereka dapat hidup mandiri secara ekonomi, sosial, serta pendidikan. Pusat pemberdayaan seringkali memberikan pelayanan sosial berupa pelatihan, pendidikan, serta bimbingan yang dapat mendukung potensi masyarakat.

2.4.2. Fasilitas Pusat Pemberdayaan Wanita

Pusat pemberdayaan wanita memiliki peran yang utama dalam menciptakan Masyarakat yang lebih setara, adil, dan inklusif dengan dapat memberikan peluang kepada para perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal di berbagai bidang kehidupan. Fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas fisik dalam wujud sarana dan prasarana maupun fasilitas non fisik dalam bentuk pelayanan atau program yang ada dalam pusat pemberdayaan. Fasilitas fisik yang terdapat pada *empowerment centre* atau pusat pemberdayaan adalah:

- a. Pusat Studi
- b. Pusat Keterampilan
- c. Pusat Konsultasi dan Pendampingan Psikologis
- d. Asrama atau *shelter*
- e. Aula
- f. Amphitheatre
- g. Pengelola Bangunan

Fasilitas penunjang pada pusat pemberdayaan adalah:

- a. Plaza
- b. Pos Satpam
- c. Area Parkir
- d. Ruang Hijau
- e. Masjid
- f. *Power House*

Selain fasilitas fisik, pusat pemberdayaan wanita memiliki fasilitas layanan yang dapat berupa strategi fasilitas pemberdayaan perempuan yang dijelaskan dalam buku Panduan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan di Desa dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu persiapan, pengorganisasian, dan advokasi.

Berikut merupakan uraian mengenai strategi fasilitas pemberdayaan perempuan:

Persiapan	Pengorganisasian	Advokasi
1. Membangun misis bersama 2. Menciptakan fasilitator	1. Membangun kesadaran kritis dan tujuan bersama-sama	1. kebijakan desa 2. hukum 3. peningkatan jaringan

3. Melahirkan kader pemberdayaan perempuan	2. Memperkuat organisasi perempuan 3. Peningkatan volume atau kapasitas 4. Pengembangan aktivitas kepemimpinan wanita	
--	---	--

Tabel 2.1 Strategi Fasilitas Pemberdayaan Wanita

Sumber: Buku Panduan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan di Desa

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Sela & Rizqiyah (2022) dalam Utami (2023), terdapat jenis karakteristik dalam perancangan bangunan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan pusat pemberdayaan Wanita bagi Wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat dari rancangannya. Prinsip perancangan pusat pemberdayaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

No	Prinsip	Hubungan dengan Objek Rancangan
1.	<i>The city is for all</i>	Keterlibatan perempuan dalam pengasuhan anak-anak dan lansia mencakup aspek inklusivitas lingkungan yang mendukung peran mereka.
2.	<i>Reclaiming public space for everyday life</i>	Selain memiliki tujuan dan fungsi utama pemberdayaan, desain objek juga dirancang dengan berbagai fungsi tambahan untuk menjamin keamanan dan kemudahan akses bagi penggunanya
3.	<i>The important of the local</i>	Masyarakat sekitar memahami tujuan dan maksud dari objek rancangan, sehingga lingkungan di sekitarnya akan lebih mendukung keberadaan objek tersebut.
4.	<i>Local economy</i>	Dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal
5.	<i>The power of presence</i>	Sebagai bentuk pengawasan pasif, yang melibatkan penempatan banyak orang di ruang publik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
6.	<i>Re-integrating the culture of care into public life</i>	Ruang publik yang dibentuk harus tetap mempertahankan sifat pribadi, namun pada saat yang sama juga harus memungkinkan adanya pengakuan publik dan visibilitas untuk saling mengawasi.
7.	<i>Civic engagement and integration</i>	Area umum atau publik yang difasilitasi harus bersifat fleksibel, menyenangkan, dan mendukung bagi perempuan, sehingga mereka dapat berkembang dengan nyaman.

Objek perancangan menjadi hal yang utama untuk diperhatikan mengenai kenyamanan juga keamanan para wanita yang ada di pusat pemberdayaan wanita.

2.5 Tinjauan Umum Arsitektur Perilaku

2.5.1. Definisi Arsitektur Perilaku

Arsitektur perilaku adalah suatu konsep desain yang mengintegrasikan pertimbangan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses perancangannya. Seiring perkembangannya, perhatian terhadap perilaku manusia menjadi bagian penting dalam merancang, yang sering juga disebut sebagai kajian mengenai hubungan antara lingkungan dan perilaku dalam bidang arsitektur.

Pada buku *Behavioral Architecture, towards an accountable design process* dijelaskan bahwa kata “perilaku” menjelaskan adanya struktur sosial yang ada, suatu kesadaran kolektif yang berkembang secara dinamis seiring berjalannya waktu. Perilaku manusia dapat dirincikan menjadi dua, yaitu:

- f. Perilaku tertutup, reaksi individu yang bersifat tertutup, terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, dan sikap yang ada dalam diri seseorang, yang belum dapat dilihat atau diamati dengan jelas oleh orang lain.
- g. Perilaku terbuka, reaksi seseorang yang diwujudkan melalui tindakan nyata atau terbuka, di mana respons tersebut terlihat jelas dan dapat diamati oleh orang lain.

Lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap lingkungan dengan adanya timbal balik. Hal tersebut telah diterangkan oleh Gibson (Lang) pada diagram gambar sebagai berikut berikut:



Gambar 2.2 Skema Pemgaruh Lingkungan

Faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia (Setiawan, 1995), antara lain:

- 1) Ruang, yaitu bagaimana ruang dapat memengaruhi tindakan manusia dari sebuah fungsi ruang tersebut.

- 2) Bentuk dan ukuran, ukuran dan bentuk pada ruang harus selalu menyesuaikan fungsi ruangan karena ukuran dapat memengaruhi psikologis penggunanya. Bentuk dan ukuran dapat memiliki sifat permanen, tetap, atau fleksibel, tergantung pada tujuan penggunaannya. Ukuran dan bentuk ruang yang sangat besar dapat memberi kesan membuat orang merasa kecil dan tidak berdaya, sementara ruang yang sempit dapat menciptakan kesan yang kurang nyaman dan sesak.
- 3) Warna, dalam penciptaan sebuah ruang warna memiliki peran penting untuk menimbulkan suasana ruangan tersebut.
- 4) Suara, temperature, dan pencahayaan. Suara yang terlalu keras dan bising dapat mengganggu aktivitas seseorang, menyebabkan ketidaknyamanan, dan menurunkan kinerja. Suhu ruangan juga dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna pusat pemberdayaan wnaita. Ruangan yang terlalu panas bisa membuat udara terasa pengap dan sesak, yang dapat meningkatkan perilaku agresif, sementara ruangan yang terlalu dingin bisa mengurangi konsentrasi dan membuat kinerja menjadi kurang optimal. Pencahayaan yang terlalu terang dapat merusak mata dan mengurangi kenyamanan visual bagi pengguna. Polusi suara dalam ruangan bisa berasal dari langkah kaki, gesekan benda mati, atau percakapan antar manusia
- 5) Tata ruang dan *furniture* yang ada di dalam ruang. Pemilihan *furniture* dapat menjadi suatu hal yang memengaruhi kegiatan dan perilaku pengguna di dalamnya. Penataan perabot harus dapat menunjang aktivitas para pengguna pusat pembersayaan.

Perilaku pengguna menjadi hal yang penting dalam mendesain bangunan pusat pemberdayaan perempuan. Perilaku yang mempengaruhi desain arsitektural mencakup aspek interpersonal manusia, seperti ruang pribadi, teritorialitas, kepadatan dan kesesakan, serta privasi (Marcella, 2014: 107).

Ruang personal adalah area tidak terlihat langsung oleh indera penglihatan yang mengelilingi kita dalam jarak tertentu. Ruang personal berfungsi sebagai batas privasi individu, serta pengaruhnya terhadap ruang untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Ruang personal dibagi menjadi 2 jenis. *Pertama*, ruang personal alfa yang memiliki sifat objektif. *Kedua*, ruang personal beta yang memiliki sifat subjektif. Sebagai ruang saat seseorang berkomunikasi, ruang personal alfa terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Jarak intim, memiliki jarak 0 meter sampai dengan 0,5 meter.
2. Jarak personal, memiliki jarak 0,5 meter sampai dengan 1,2 meter.
3. Jarak sosial, memiliki jarak 1,2 meter sampai dengan 3,6 meter.

4. Jarak publik, memiliki jarak 3,6 meter sampai dengan lebih dari 7 meter.

Ruang personal dalam penerapannya terhadap desain terbagi menjadi ruang sosiopetal dan ruang sosiofugal. Kedua ruang tersebut diuraikan sebagai berikut:

Ruang Sosiopetal	Ruang Sosiofugal
Berkaitan dengan suatu bentuk respons dalam desain arsitektur yang bertujuan untuk mendorong interaksi sosial antar penggunanya. Desain ini dapat mencakup pengaturan perabotan dan tata letak ruang	Merupakan bentuk respons dalam desain arsitektur yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya interaksi sosial antar pengguna.

2.5.1. Prinsip Arsitektur Perilaku

Aspek-aspek utama dalam tema arsitektur perilaku yang perlu diperhatikan saat menerapkannya, sebagaimana dijelaskan oleh Carol Simon Weisten dan Thomas G. David dalam (Ariska & Marlina, 2021) antara lain:

- a. Dapat menjalin komunikasi dengan manusia dan lingkungannya, desain harus mudah dipahami oleh pengguna melalui pancaindra maupun daya imajinasi mereka. Wujud bangunan yang ditampilkan perlu dapat dikenali dan dimengerti dengan jelas oleh para penggunanya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan pengamatan manusia terhadap bangunan tersebut:
 - 1) Mencerminkan fungsi pada bangunan;
 - 2) Dapat menunjukkan skala dan proporsi yang sesuai;
 - 3) Menjelaskan struktur dan material yang diimplementasikan pada bangunan.
- b. Menjadi wadah untuk berbagai aktivitas penggunanya dengan nyaman baik secara fisik maupun mental, dan dapat memberikan perasaan senang;
- c. Memperhatikan keadaan dan tindakan para penggunanya

2.5.2. Perilaku Penghuni Dalam Ruang

Pola perilaku manusia dalam suatu ruang merupakan sebuah proses interaksi antara penghuni ruang dengan lingkungannya. Menurut Rapoport (1982), elemen ruang dalam arsitektur dibagi menjadi tiga, yaitu elemen *fixed*, *semi fixed*, dan *non fixed*. Perilaku manusia sendiri masuk ke dalam kategori elemen *non fixed* yang lebih terkait dengan manusia sebagai pengguna ruang. Untuk memahami berbagai dimensi perilaku manusia, diperlukan suatu kajian

terhadap atribut-atribut yang memengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya. Atribut tersebut menurut Windley & Scheidt dalam Weisman (Hantono, 2019) diantaranya:

- a. Kenyamanan (*comfort*), yaitu kondisi suatu lingkungan sesuai dengan Indera dan antropometrik yang merupakan proporsi tubuh manusia yang disertai dengan fasilitas yang sesuai dengan aktivitas di dalamnya
- b. Sosialitas (*sociality*), merupakan seseorang mampu untuk melaksanakan hubungan sosial dengan individu yang lain dalam suatu pengaturan tertentu, yang terhubung dengan jarak antar individu, perilaku non verbal, juga susunan fasilitasnya.
- c. Visibilitas, merupakan kemampuan untuk memperoleh pandangan yang jelas terhadap objek yang dituju tanpa adanya hambatan visual yang mengganggu penglihatan.
- d. Aksesibilitas (*accessibility*), yaitu kemudahan dalam berpindah tempat melalui jalur sirkulasi serta kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya.
- e. Adaptabilitas (*adaptability*), yaitu kapasitas suatu lingkungan untuk mengakomodasi berbagai jenis perilaku, termasuk perilaku baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- f. Rangsangan inderawi (*sensory stimulation*), yaitu tingkat kualitas dan kekuatan rangsangan yang dialami sebagai sensasi oleh indera manusia.
- g. Kontrol (*control*), yaitu keadaan suatu lingkungan untuk melahirkan batas ruang dan wilayah kekuasaan, batasan atau teritori.
- h. Aktivitas (*activity*), yaitu tindakan atau aktivitas yang berlangsung secara berulang dan konsisten di dalam suatu ruang atau lingkungan.
- i. Kesesakan (*crowdedness*), yaitu perasaan tentang tingkat keramaian atau aktivitas yang terjadi di dalam suatu ruang atau lingkungan.
- j. Privasi (*privacy*), yaitu kecenderungan individu untuk menghindari gangguan dari interaksi dengan orang lain.
- k. Makna (*meaning*), yaitu kapasitas suatu ruang atau lingkungan untuk mengkomunikasikan tujuan, nilai-nilai pribadi, maupun budaya kepada penggunanya.
- l. Legabilitas (*legability*), yaitu perasaan mudah bagi setiap individu untuk mengenali elemen-elemen utama dan hubungan dalam suatu ruang atau lingkungan, sehingga dapat dengan mudah menentukan arah.

2.5.3. Behavior Setting (Setting Perilaku)

Behavior setting dapat diartikan sebagai suatu interaksi antara suatu kegiatan dengan tempat yang spesifik. Dalam behavior setting terdapat unsur-unsur sekelompok orang yang melakukan aktivitas, tindakan dari sekelompok individu, lokasi di mana kegiatan itu

berlangsung, serta waktu tertentu ketika kegiatan tersebut terjadi. *Behavior setting* dijelaskan melalui dua istilah, yaitu:

- (1) *System of setting* sistem tempat atau ruang, yaitu elemen fisik atau spasial yang memiliki hubungan tertentu, yang saling terkait sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu..
- (2) *System of activity* atau rangkaian aktivitas yang melibatkan perilaku yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh individu atau kelompok.

Setiap individu atau sekelompok manusia dapat membentuk suatu *behavior setting* yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dengan nilai-nilai, keputusan, juga kesempatan yang ada pada individu atau sekelompok manusia tersebut.

2.5.4. Perempuan dan Ruangnya

Perempuan dan ruangnya merujuk pada konsep tentang bagaimana perempuan berinteraksi, mengalami, dan membentuk ruang di sekitar mereka, baik dalam konteks fisik maupun sosial. Ruang yang dimaksud bisa berupa lingkungan rumah, tempat kerja, ruang publik, atau ruang komunitas, yang semuanya memengaruhi kehidupan perempuan secara langsung maupun tidak langsung.

2.6 Studi Banding Referensi

2.6.1 Women's Opportunity Center Kayonza in Rwanda

Women's Opportunity Center Kayonza adalah sebuah pusat yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di Rwanda, dibangun di atas area seluas dua hektar yang diberikan oleh sebuah universitas. Desain Women's Opportunity Center Kayonza dibuat oleh Sharon Davis Design pada tahun 2011 dan dipamerkan di World Architecture Festival 2011.

Pada masa itu, jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga mayoritas korban aktivitas genosida yang jatuh adalah para wanita. Wanita Tutsi menjadi sasaran utama yang dianggap musuh yang harus dikalahkan demi kesejahteraan dan pelestarian suku Hutu (Nuzulul, 2011).

Adanya keberadaan Urugo Women's Opportunity Center, diharapkan bisa menjadi terciptanya berbagai peluang, memperbaiki kembali infrastruktur sosial, melestarikan warisan Afrika, memberdayakan komunitas, serta mendukung perempuan lokal dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pergerakan ekonomi lokal



Gambar 2.3 *Women's Opportunity Center Kayonza*

Sumber: www.archdaily.com

Pusat pemberdayaan perempuan ini menyediakan layanan berskala internasional sebagai bagian dari upaya menyelamatkan perempuan dan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Women's Opportunity Center dirancang dengan konsep sebuah desa kecil yang mengubah komunitas perkotaan yang tidak berkelanjutan dan pertanian menjadi sebuah ruang arsitektur yang menciptakan peluang untuk pengembangan ekonomi, meningkatkan infrastruktur sosial, dan memulihkan warisan budaya bangsa Afrika.

a. Tinjauan Aksesibilitas

Women's Opportunity Center ini berada di Kayonza di Kawasan yang merupakan Lembah subur mendorong kegiatan pertanian yang ada di dalamnya. Batasan lokasi *Women's Opportunity Center* berada pada:

- Sisi sebelah Utara : Area Lahan kosong
- Sisi sebelah Selatan : Area Permukiman
- Sisi sebelah Barat : Area Permukiman
- Sisi sebelah Timur : Area Lahan Perkebunan

Akses menuju pusat pemberdayaan telah terjamin dengan efisien, dibuktikan dengan adanya jalan yang telah diaspal di sisi depan bangunan, mengingat sebagian besar jalan-jalan di negara-negara Afrika pada umumnya masih berupa tanah pasir tanpa perkerasan yang memadai. Bangunan ini memiliki 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Salah satu pintu masuk utama langsung mengarah ke area berkumpul, sementara pintu masuk samping digunakan untuk menuju ke peternakan. Pintu keluar utama terletak bersebelahan dengan pintu masuk utama

b. Bentuk Bangunan

Bangunan *Women's Oppportunity Center* mempunyai bentuk melingkat yang dapat meluas dari dalam bergabung dengan fungsi luar lainnya. Bentuknya menerapkan konsep radial dan mengacu pada metode konstruksi arsitektur vernakular Rwanda.

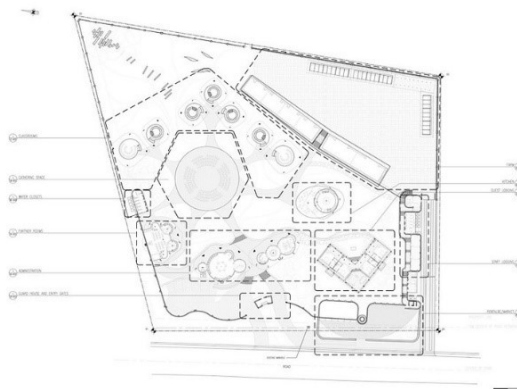


Gambar 2.4 Bentuk Bangunan *Women's Oppportunity Center*

Sumber: *Elizabeth Felicella Photography*

c. Tatahan Massa

Women's Oppportunity Center memiliki konsep bangunan massa banyak dan beberapa ruangan, diantaranya yaitu marketplace, dapur, area pertanian, cluster class, ruang mitra, dan ruang komunal.



Gambar 2.5 *Layout Women's Oppportunity Center*

Sumber: www.archdaily.com

d. Struktur dan Material

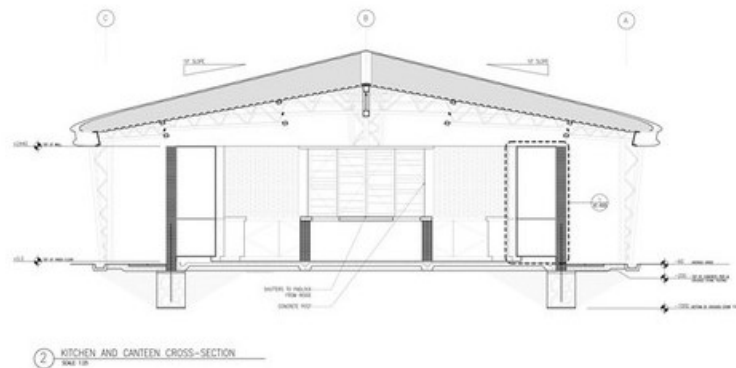
Material dinding bangunan menggunakan keterampilan batu bata dari tanah liat yang berjumlah sekitar 450.000 buah. Batu bata disusun dengan teknik press yang diambil dari teknik bangunan konsep lokal. Wanita setempat turut serta bekerja untuk membantu membuat bata menggunakan cetakan baja. Penggunaan material batu bata dapat memberikan kestabilan

dan keberlanjutan, yang penting dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk pemberdayaan perempuan



Gambar 2.6 Perempuan di *Women's Opportunity Center*

Sumber: www.architectural-review.com



Gambar 2.7 Potongan Bangunan Dapur dan Kantin *Women's Opportunity Center*

Sumber: www.architectural-review.com

Atap dan kolom penopang atap dibangun dengan menggunakan struktur rangka baja ringan tipe spine truss, yang terdiri dari dua ukuran baja berbeda, yakni 75mm x 75mm x 4mm dan 100mm x 100mm x 6mm.

e. Aktivitas

Perempuan melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan seperti demonstrasi untuk memproduksi dan memasarkan barang-barang mereka secara mandiri. Selain melakukan aktivitas jual beli, mereka juga melakukan pembelajaran untuk beternak. Untuk mempertahankan skala dan kualitas berbagai ruang, organisasi tempat tinggal tradisional

Rwanda dan struktur desa menjadi sumber inspirasi dalam merancang pola tatanan bangunan. Sekelompok paviliun disusun mengelilingi area kegiatan yang ada di pusat pemberdayaan ini



Gambar 2.8 Paviliun Women Opportunity Center

Sumber: <https://sharondavisdesign.com/>

f. Penghawaan dan Pencahayaan

Women's Opportunity Center berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan kayu bakar guna mencegah deforestasi yang meluas di negara tersebut. Oleh karena itu, bangunan ini menggunakan biogas sebagai sumber energi. Pada pagi hingga sore hari, pencahayaan bergantung pada cahaya alami yang dipantulkan oleh sinar matahari, yang kemudian masuk ke dalam bangunan dan difilter melalui struktur massa bangunan yang terdiri dari susunan bata dengan rongga di setiap bagiannya. Sementara itu, pada malam hari, pencahayaan diperoleh dari lampu yang menggunakan energi listrik..



Gambar 2.9 Women Opportunity Center

Sumber: <https://archdaily.com/>

Sistem penghawaan di seluruh ruang bangunan ini mengandalkan ventilasi alami, dengan angin sepoi-sepoi yang dapat masuk melalui rongga pada susunan massa bangunan. Kualitas sirkulasi udara di dalam ruangan terjaga dengan baik berkat desain susunan massa yang berlubang dan bentuk atap yang mendukung sirkulasi udara yang efektif dan optimal

g. Fasilitas



Gambar 2.10 Fungsi Massa Bangunan *Women Opportunity Center*

Sumber: <https://architizer.com/>

Bangunan *Women's Opportunity Center* memiliki massa banyak dengan 1 level lantai di beberapa massanya. Untuk massa bangunan asrama memiliki 2 level lantai. Berikut merupakan fasilitas yang terdapat pada bangunan *Women's Opportunity Center*:

No	Fasilitas	Aktivitas yang terjadi	Jumlah
1	Klaster Kelas	Tempat belajar, beriskusi dan mengembangkan potensi diri	9
2	Kloset	Area pengambilan air bersih	2
3	Penginapan bagi para tamu	Tempat tamu beristirahat, mempersiapkan diri, dan membersihkan badan	1
4	Area retail	Untuk penjualan hasil dna produk yang dihasilkan dari program pemberdayaan	2
5	Area Berkumpul	Kegiatan berkumpul, bersosialisasi	1
6	Asrama Perempuan	Beristirahat, membersihkan diri, mempersiapkan diri	1
7	Penginapan Staf	Staff beristirahat, membersihkan diri, mempersiapkan diri	11
8	Dapur dan Kantin	Memasak, makan, minum, mengolah makanan, bersosialisasi	
9	Kantor serta Gudang	Menyimpan perabot, bekerja, mengelola dokumen	1
10	Pos Satpam	Untuk tempat petugas mengawasi keamanan	1

11	Peternakan Hewan	Pemeliharaan hewan, memberikan pakan kepada ternak	1
12	Kelas Ternak	Untuk berbagi ilmu, sharing, untuk belajar mengenai ternak	2
13	Pos	Untuk mengawasi kegiatan, keadaan, dan sebagai pos keamanan yang ada di area tersebut	1
14	Produksi Makanan	Mengelola hasil ternak, mengolah bahan makanan	1
15	Perkebunan	Budidaya tanaman dan sayuran	1
16	Gedung Administrasi	Sebagai tempat untuk bekerja, mengelola dokumen, menerima tamu resmi	1
17	<i>Partner Rooms</i>	Difungsikan sebagai gedung untuk berbagai kegiatan, untuk bekerja sama, menjadi tempat perkumpulan, dan melaksanakan kegiatan	1

Tabel 2.2 *Fasilitas Women's Opportunity Center* (Sumber: Analisis Penulis, 2024)

2.6.3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita atau BPRSW di Yogyakarta



Gambar 2.11 BPRSW Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Secara geografis terletak di Jalan Cokrobedog Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, provinsi D.I.Yogyakarta, BPRSW Yogyakarta luas tanah 9.995 m² dan luas bangunan 1750 m². BPRSW memiliki visi untuk mewujudkan wanita yang dapat memberikan pengaruh, terampil, dan tidak bergantung

pada orang lain.. Tujuan dari BPRSW adalah untuk mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, dan tanggung jawab sosial secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma, serta mengembangkan potensi individu agar dapat melanjutkan hidup yang produktif.

Sarana dan Prasarana

BPRSW difungsikan sebagai tempat pemulihan dan pelatihan bagi para pasien sehingga memiliki berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas yang ada. Berikut merupakan beberapa gambar sarana dan prasarana yang terdapat di BPRSW Kota Yogyakarta. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (BPRSW) Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit
Kantor	1
Aula	1
Asrama	3
Kelas Pendidikan	1
Kelas Keterampilan Menjahit, Bordir, dan Pameran	1
Kelas Tata Rias	1
Kelas Olahan Pangan	1
Kelas Konsultasi	1
Poliklinik	1
Area Makan dan Dapur	1
Tempat Sholat	1
Rumah Petugas	1
Gazebo	1
Gudang	1
<i>Emergency Trauma Center</i>	1
Gerbang	1
Pos Keamanan	1
Tempat Pakir	1
Lapangan	1
Lahan Perkebunan	1
Lahan Pertanian dan Perikanan	1
Kendaraan Roda 2	3

Kendaraan Mobil	2
Telepon	1

Tabel 2.3 Sarana Prasarana BPRSW Yogyakarta (Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Berikut merupakan beberapa gambar fasilitas yang ada di BPRSW Kota Yogyakarta:



Gambar 2.12 Tempat Pelatihan Menjahit BPRSW Yogyakarta



Gambar 2.13 Kantin BPRSW Yogyakarta



Gambar 2.14 Area Penjualan Hasil Kerajinan Klien di BPRSW Yogyakarta



Gambar 2.15 Area Pertanian dan Perikanan di BPRSW Yogyakarta



Gambar 2.16 Mushola BPRSW Yogyakarta

Sasaran

ujuan dari program pelayanan BPRSW adalah untuk membantu wanita berusia 17-40 tahun yang menghadapi ketidakharmonisan dalam kehidupan pribadi dan sosial, mengalami penyimpangan norma, sehingga rentan terhadap gangguan sosial psikologis. Kategori yang dimaksud adalah wanita:

- Rawan Sosial Ekonomi
- Keluarga Broken Home/ Terlantar
- Putus sekolah/ tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja
- Korban kekerasan seksual
- Eks TS
- Korban KDRT
- Korban Eksploitasi Ekonomi
- Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- Korban Trafficking/ Perdagangan Orang
- Dengan Kehamilan yang tidak dikehendaki

Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan klien di BPRSW Yogyakarta adalah bentuk perlindungan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di balai dengan kapasitas 60 orang. Selama mengikuti pelayanan, warga binaan diwajibkan untuk tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak BPRSW.

Tahap Pelayanan

1) Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi ini melibatkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui koordinasi dengan wilayah Kabupaten dan Kota se-DIY, serta pelaksanaan dan partisipasi dalam pertemuan masyarakat, termasuk di desa-desa terpencil. Selain itu, penyebaran informasi dilakukan melalui leaflet dan media massa lainnya

2) Tahap Penerimaan

Tahap penerimaan merupakan tahap kedua yang dilakukan setelah melakukan tahap sosialisasi, yaitu setelah pihak BPRSW mendapatkan informasi klien dan memasuki langkah tahap, yakni:

- a) Pendekatan Awal dan rekrutmen
- b) Identifikasi
- c) Motivasi
- d) Seleksi
- e) Registrasi
- f) Orientasi dan konsultasi
- g) Pengungkapan dan Penelaahan Masalah
- h) Penempatan klien dalam asrama
- i) Penempatan dalam Program Pelayanan
- 1) Tahap Rehabilitasi Sosial
- 2) Tahap Resosialisasi
- 3) Tahap Bimbingan Lanjut
- 4) Tahap Terminasi

Kegiatan Penunjang Pelayanan

- 1) Pertemuan Pra Pemulangan Orang Tua Warga Binaan
- 2) *Family live in*
- 3) Kajian tingkat keberhasilan pelayanan
- 4) Pertemuan jejaring potensi dan sumber kesejahteraan sosial

5) Workshop program BPRSW Yogyakarta

2.6.3 Panti Pelayanan Sosial PGOT “Mardi Utomo” Kota Semarang

Panti pelayanan sosial merupakan fasilitas yang memberikan perlindungan dan perawatan kepada individu-individu yang membutuhkan bantuan khusus, termasuk anak-anak yatim piatu, lansia, dan orang-orang dengan kebutuhan khusus lainnya. Panti Pelayanan Sosial PGOT “Mardi Utomo” Kota Semarang merupakan tempat yang dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para gelandangan, pengemis, dan orang-orang yang terlantar di bidang rehabilitasi sosial. Visi dari Panti Pelayanan Sosial PGOT “Mardi Utomo” adalah untuk mengembangkan kualitas ekonomi Masyarakat dan memberikan kesempatan kerja bagi individu atau kelompok Masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan juga pengangguran.

a. Lokasi Panti Mardi Utomo

Panti Mardi Utomo berada di Jl. Ringin Bhakti Raya, Kramas, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50278. Luas tanah dari Panti Mardi Utomo adalah seluas 6,8 Ha.

b. Sarana dan Prasarana

Berikut merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di Panti Pelayanan Sosial PGOT “Mardi Utomo” Kota Semarang:

- 1) Kantor
- 2) Gedung Rapat
- 3) Ruang Keterampilan
- 4) Ruang Peksos
- 5) Dapur Utama
- 6) Gudang
- 7) Poliklinik
- 8) Perpustakaan
- 9) Koperasi
- 10) Pos Satpam
- 11) Pos Jaga
- 12) Kapulogo
- 13) Aula
- 14) Lapangan Upacara
- 15) Taman Rusa
- 16) Lapangan Apel dan Kegiatan
- 17) Ruang Pendidikan

18) Taman Indigo



Gambar 2.17 Beberapa Sarana dan Prasarana Panti Mardi Utomo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Program Rehabilitasi Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

- 1) Motivasi dan Diagnosis Psikosional
- 2) Perawatan dan Pengasuhan
- 3) Bimbingan Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan
- 4) Bimbingan Mental dan Spritual
- 5) Bimbingan Fisik
- 6) Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial
- 7) Pelayanan Aksesibilitas
- 8) Bantuan dan Asistensi Sosial
- 9) Bimbingan Resosialisasi
- 10) Bimbingan Lanjut

d. Pengguna dan Sumber Daya Manusia

Panti Pelayanan ini memfasilitasi sebanyak 75 klien dari berbagai latar belakang yang termasuk ke dalam kategori PGOT. Dalam melaksanakan tugas dan berusaha mencapai keberhasilannya, Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Kota Semarang memiliki sebanyak 27 orang karyawan yang mana dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipl sebanyak 20 orang
- 2) Non PNS (Pegawai Kontrak) sebanyak 7 orang.

2.7 Hasil Analisa Studi

Bersasarkan hasil analisa dari ketiga studi kasus diatas yaitu Women's Opportunity Center Rwanda, BPRSW Kota Yogyakarta, dan Pantai Pelayanan Sosial Mardi Utomo maka dapat bandingkan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Aspek	Women's Opportunity Center	BPRSW Kota Yogyakarta	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Kesimpulan
1	Fungsi Bangunan	Menciptakan peluang untuk memperbaiki infrastruktur sosial, melestarikan warisan budaya Afrika, memberdayakan komunitas, mendukung perempuan lokal dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka, serta berkontribusi pada pergerakan perekonomian lokal.	Membantu mengatasi atau menyembuhkan trauma yang terjadi pada klien penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Yogyakarta dna memberikan pelatihan edukasi dan keterampilan	Membantu proses rehabilitasi para penyandang maslaah kesejahteraan sosial serta memberikan pelatihan edukasi dan keterampilan	Ketiga studi kasus ini bertujuan untuk memulihkan kondisi serta mendukung kemajuan perempuan yang mengalami maslaah kesejahteraan sosial agar dapat hidup mandiri
2.	Lokasi	Berada di atas Lembah yang subur guna membuka peluang	Terletak di lingkungan permukiman warga sehingga	Terletak tidak jauh dari perumahan warga dan	Terletak di lingkunagn yang mendukung

		baru untuk arsitektur dan pertanian	mudah diakses dan dapat menyediakan tempat berlindung yang aman seperti di rumah	memberikan akses yang mudah bagi para warga sekitar	sesuai dengan program yang dijalankan, mensupport keberadaan objek studi kasus, dengan lingkungan yang tenang, kondisi yang mendukung kegiatan pemberdayaan, serta mudah dijangkau dari jalan utama.
3	Tatanan Massa	Terdiri dari beberapa massa bangunan terpisah disesuaikan dengan fungsi dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya	Massa bangunan dibagi menjadi banyak sesuai dengan kegunaan dan juga fungsinya	Memiliki massa bangunan banyak, dan terdapat ruang kounal di sekitar massa pada tapak	Tatanan massa ketiga bangunan memiliki pola tatanan massa banyak dan terpusat pada satu ruang publik atau area bersama sebagai pengawasan pasif untuk perempuan satu sama lain
4	Fasilitas	Sudah terdapat fasilitas memadai	Fasilitas yang disediakan sudah	Memiliki fasilitas yang	Ketiga bangunan

		untuk melakukan kegiatan	cukup memadai, namun beberapa kegiatan menggunakan fasilitas yang digabungkan sehingga kurang efektif untuk melaksanaan kegiatan	cukup baik dan dapat difungsikan para penggunanya, namun Sebagian fasilitas tidak terawat sehingga tidak dapat digunakan	sudah memiliki fasilitas yang dapat memadai kegiatan pemberdayaan
5	Bentuk	Women's Opportunity Center Rwanda mempunyai desain bangunan yang mencerminkan identitas masyarakat lokal Rwanda, dengan tampilan yang didominasi oleh bentuk-bentuk lengkung.	Tidak terlalu memiliki identitas, fasad mengarah ke halaman tengah dan didominasi oleh bentuk persegi	Tidak terlalu memiliki identitas, fasad mengarah ke halaman tengah dan didominasi oleh bentuk persegi	Ketiga bangunan memiliki komposisi bentuk yang bervariasi, desain tersebut tetap menjaga keamanan dan privasi penggunanya
6	Warna	Warna yang digunakan adalah warna yang senada dengan alam sehingga menggambarkan fungsinya yang juga sebagai	Menggunakan warna yang terang dan tenang yaitu warna cream, sehingga memberikan kesan natural	Menggunakan warna yang terang dan cenderung bervariasi, sehingga memberikan	Warna yang dipilih tersebut dapat mempengaruhi psikologis perempuan dalam bangunan

		pengembangan pertanian dan peternakan		kesan ceria dan fleksibel	
--	--	---	--	------------------------------	--

Tabel 2.4 Hasil Analisa Studi Preseden (Sumber: Analisa Penulis, 2024)

Ketiga objek studi kasus dirancang khusus untuk masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, yang serupa dengan tujuan dari pusat pemberdayaan wanita, yakni untuk membina dan memberdayakan serta memperbaiki kondisi mental para wanita. Dalam perancangan Pusat Pemberdayaan Wanita di Yogyakarta, ketiga konsep bangunan dari objek studi kasus akan digabungkan, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas yang ada di dalamnya.

2.8 Tinjauan Bangunan Arsitektur Hijau

2.8.1 Definisi Arsitektur Hijau (*Green Architecture*)

Konsep *Green Architecture* adalah pendekatan untuk membangun suatu bangunan yang difokuskan untuk meminimalisasi '*harmful effect*' terhadap lingkungan hidup manusia. Pendekatan arsitektur hijau sangatlah mengarah pada kepedulian lingkungan terhadap efisiensi energi (*energy efficient*) yang dihasilkan, konsep arsitektur berkelanjutan (*sustainable concept architecture*), dan penerapan holistic (*holistic application*).

Konsep *Green Architecture* sering digunakan saat ini karena adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi lokasi dan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang semakin menipis dan tidak dapat terbarukan. *Green Architecture* merupakan konsep desain arsitektur yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap keseimbangan alam dan manusia, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan baik, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan kenyamanan bagi para pengguna bangunan.

2.8.2 Prinsip Arsitektur Hijau

Berdasarkan Brenda dan Robert Vale, 1991, *Green Architecture Design fo Sustainable Future*, arsitektur hijau memiliki prinsip sebagai berikut:

a. Hemat Energi atau *Conserving Energy*

Arsitektur hijau mengutamakan pengelolaan energi yang efektif dan efisien sebagai prinsip utama. Bangunan yang dirancang dengan baik harus mempertimbangkan penggunaan energi baik sebelum maupun sesudah proses konstruksi untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi bangunan. Desain bangunan dalam arsitektur hijau harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim dan lingkungan sekitarnya tanpa mengubah

karakter lingkungan yang sudah ada. Desain hemat energi melibatkan optimalisasi berbagai hal diantaranya:

- Bentuk massa bangunan didesain dengan bentuk memanjang dan ramping untuk meningkatkan efisiensi pencahayaan alami sekaligus mengurangi konsumsi energi listrik.
- Menggunakan warna cat pada interior bangunan dengan warna yang relatif terang namun tidak terlalu mencolok untuk meningkatkan pantulan cahaya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pencahayaan di dalam ruangan lebih optimal.
- Energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber listrik melalui panel fotovoltaik yang dipasang di atap. Atap dirancang miring mengikuti arah barat-timur atau sejajar dengan pergerakan matahari, agar dapat mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari sepanjang hari
- Jendela dilengkapi dengan tirai penahan panas matahari (*sunscreen*) yang dapat mengontrol intensitas cahaya dan panas berlebih, sehingga menciptakan kenyamanan termal di dalam ruangan secara efisien.
- Pemasangan lampu listrik hanya di area dengan kebutuhan pencahayaan rendah. Selain itu, penggunaan sistem kontrol otomatis untuk mengurangi intensitas cahaya, memastikan lampu hanya menyala sesuai kebutuhan hingga mencapai tingkat kecerahan tertentu.
- Meminimalisasi penggunaan lift dan alat pendingin (AC)

b. Pemanfaatan Keadaan dan Sumber Energi Alam

- Menggunakan vegetasi dan air sebagai pengaturan iklim
- Penggunaan sistem pompa air dan ventilasi silang untuk menyalurkan udara segar dan sejuk ke tiap tiap interior ruangan.
- Memerhatikan orientasi matahari dan bangunan yang baik.
- Menggunakan bukaan dan atap yang dirancang agar sebagian dapat ditutup serta dibuka sebagai pengatur pencahayaan dan ventilasi sesuai kebutuhan ruangan.

c. Menanggapi Situasi Tapak Bangunan

Perencanaan bangunan harus memperhatikan interaksi antara bangunan dan tapak perancangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penggunaan material lokal dan juga material yang tidak merusak lingkungan
- Mempertahankan keadaan site dengan merancang bangunan yang menyesuaikan dengan kontur dan bentuk tapak yang ada.

- Membuat desain bangunan secara vertikal sehingga memiliki luas permukaan dasar yang kecil.
- d. **Memperhatikan Penghuni atau Pengguna Bangunan**
Pengguna bangunan dan arsitektur hijau memiliki hubungan yang erat. Kebutuhan mengenai arsitektur hijau harus memperhatikan keadaan dan kebutuhan pemakai yang terintegrasi dalam perencanaan serta pelaksanaannya.
 - e. **Menggunakan dengan Minimal Sumber Daya yang Baru**
Bangunan sebaiknya diciptakan untuk memaksimalkan penggunaan material yang sudah ada dan meminimalkan pemanfaatan material baru. Pada waktu yang selanjutnya, material tersebut dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.
 - f. *Holistic*
Merancang bangunan dilakukan dengan mengintegrasikan lima prinsip utama dalam proses perancangan.

2.8.3 Bangunan Hijau

2.8.3.1 Definisi Bangunan Hijau

Bangunan hijau atau *green architecture* adalah konstruksi bangunan yang proses pembangunannya menerapkan prinsip sumber hemat energi, juga tidak merusak lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan mulai saat pemilihan lokasi hingga renovasi dan peruntukan bangunan. Selain hemat energi, green building juga menghemat air, melindungi sumber daya alam, memperbaiki kualitas udara, dan mengelola sampah secara efektif.

2.8.3.2 Penerapan Aspek Arsitektur Hijau pada Desain Bangunan

Penerapan aspek arsitektur hijau pada bangunan dapat diaplikasikan mulai dari bentuk bangunan, green roof, sistem pencahayaan dan *water recycling system*.

- a. **Orientasi dan Bentuk Bangunan**
Bangunan sebaiknya tidak diorientasikan menghadap ke arah barat karena ketika sore hari cahaya matahari cenderung dapat membuat bangunan menjadi panas dan silau.
- b. *Green Roof*
Green roof atau atap hijau merupakan struktur bangunan permukaan atap yang ditutupi oleh vegetasi yang dapat membuat bangunan menjadi lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
- c. **Sistem Pencahayaan**

Sistem pencahayaan pada bangunan menggunakan *intelligent lighting system* yang diatur melalui panel kontrol utama. Lampu akan menyala atau mati secara otomatis dengan bantuan sensor gerak dan sensor cahaya (*motion sensor* dan *lux sensor*). Dengan sistem ini, energi yang digunakan untuk pencahayaan dapat dihemat secara signifikan

d. *Water Recycling System*

Sistem daur ulang air (*Water Recycling System*) digunakan untuk mengolah air limbah sehingga dapat dimanfaatkan kembali, seperti untuk flushing toilet atau menyiram tanaman. Dengan cara ini, penggunaan air bersih dapat diminimalkan, menjadikannya elemen penting dalam mendukung penerapan konsep *green building*.